

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Jejak Konflik Pilkada di Papua

Dalam perjalanan politiknya, Papua telah mengalami konflik horizontal dalam pesta demokrasi di Papua. Dari pengalaman pemilu, baik pemilu anggota DPR dan DPD dan DPRD serta persiden dan wapres, ditambah pilkada, teridentifikasi banyak banyak timbul permasalahan yang berpotensi konflik- konflik yang paling tajam justru terjadi pada pemilihan kepala daerah. Munculnya konflik pada saat pemilihan kepala daerah memang sudah di prediksi sebelumnya. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berjuang pada intensitas konflik. Setiap perang suku yang kerap terjadi di kabupaten, ketika moment-moment pesta demokrasi pada para calon kepala daerah cerdas dan bersaing untuk puncak Papua menyumbangkan uang yang cukup besar ratusan sampai miliaran rupiah untuk suku yang berperang. Apalagi waktu diadakan acara bayar kepala tentu para calon kepala daerah nilai uang yang cukup besar. Itu artinya para kepala daerah membeli suara masyarakat kemudian masyarakat pun bungkus suaranya untuk calon kepala daerah yang menyumbang uang. Jual beli suara kerap terjadi antara masyarakat dengan calon kepala daerah yang punya uang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal tersebut. Para calon kepala daerah mereka tidak berpikir secara empirik.

A. Konflik Antara Suku Amungme Dan Dani

Konflik yang terjadi di kabupaten Puncak Papua yaitu pada tanggal 31 Juli 2021, perang suku terjadi antara Simon Alom suku Amungme sebagai calon Bupati dan Elvis Tabuni suku Dani. Kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran Simon Alom sebagai Calon Bupati Puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, Elvis Tabuni (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut dukungannya. Ketika konflik antar pasangan bakal calon Bupati Kubu Elvis Tabuni dengan Kubu Simon Alom di kabupaten Puncak Papua, itu sesungguhnya suatu konflik kepentingan yang sengaja yang dibangun atau diciptakan oleh orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan untuk sepihak dalam pemilihan kepala daerah tersebut sesuai dengan kepentingan dalam proses berpolitik. Tentu saja kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau aktor konflik dalam berpolitik. Karena

mereka dua memiliki kepentingan yang sama untuk partai politiknya. tetapi kedua tokoh ini adalah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di monitori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik itu. berdasarkan realitas paling tidak terdapat lima sumber potensi yang dapat memicu konflik pilkada. pertama, konflik yang bersumber dari satu partai dukung dua atau tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, karena pimpinan partai Gerindra antara pusat dan daerah tidak saling mengecek atau membangun komunikasi. kedua, konflik bersumber dari KPUD tidak mengambil keputusan yang matang atau profesional. Ketiga, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan dan kedaerahan. Ke empat, konflik bersumber dari black camping antar calon, dan terakhir, konflik bersumber dari ketidaksetujuan salah satu calon terhadap panitia pemilih daerah (PPD) yang di pilih oleh KPUD di daerah tersebut.

Konflik yang menjadi pemicu konflik di kabupaten puncak adalah pimpinan partai yang dan pimpinan KPUD. mengapa saya mengatakan pemimpin partai dan KPUD sebagai konflik.? Karena pemimpin partai baik itu pusat maupun Daerah yang merekomendasikan kepada pasangan calon kepala daerah atau mengeluarkan rekomendasi tanpa saling mengetahui antara pimpinan partai pusat dan daerah, sebab kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati di timika, pasangan calon Simon Alom merekomendasikan langsung dari pusat, sementara pasangan calon Elvis Tabuni merekomendasikan dari provinsi. artinya bahwa partai yang sama yaitu partai Gerindra diusung dua pasangan calon bupati dan wakil bupati timika papua. pimpinan partai pusat tau bahwa pasangan Elvis Tabuni sudah memiliki rekomendasi dari pimpinan provinsi melalui Thomas Tabuni sebagai ketua partai Gerindra mimika papua, namun yang menjadi persoalan konflik persoalan pimpinan pusat juga mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan calon Simon Alom.

B. Faktor Penyebab Konflik dalam pemilihan kepala daerah di puncak papua.

Konflik politik horizontal pada pemilihan umum di kabupaten puncak papua adalah konflik yang terjadi antara komisi pemilihan umum Daerah puncak papua (KPUD) dengan pengurus partai Gerindra baik dengan dewan pimpinan cabang partai Gerindra (DPC) kabupaten mimika, dewan pimpinan Daerah partai Gerindra (DPP). Menurut ketua KPUD kabupaten mimika Yorin Tabuni, konflik antara KPUD dengan pengurus partai Gerindra Bermula saat pendaftaran yang di lakukan oleh calon Bupati Simon Alom dan Yosis Tenbak, tepatnya Hari Sabtu 31 Juli 2012, Simon Alom dan Yosia Tenbak dengan mendatangi kantor KPUD kabupaten puncak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum, kepala daerah kabupaten puncak, Yorin

Tabuni menolaknya, dengan alasan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPP provinsi papua yang digunakan oleh Simon Alom untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum adalah tidak sah.

Dan mengatakan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPC yang sah, yang pada saat itu telah digunakan oleh pasangan calon bupati Elvis Tabuni dan Heri Dosieanen untuk mendaftarkan diri di KPUD pada hari Sabtu 27 Juli 2012. Menurut Simon Alom dan Yosia Tenbak, KPUD menolak surat Rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak pada saat itu juga, tanpa melalui proses, seharusnya KPUD menerima terlebih dahulu surat rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak. Kemudian dilakukan pembicaraan - pembicaraan antara KPUD dengan pihak pengurus oleh partai. Penolakan yang dilakukan oleh KPUD terhadap surat rekomendasi DPP partai Gerindra yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak ini, membuat wakil ketua DPP partai Gerindra provinsi papua Amir Mahmud Madubun yang saat itu hadir di kantor KPUD kabupaten Mimika pada saat pendaftaran tersebut marah dan mengancam akan mengugat KPUD kabupaten Puncak Papua ke KPU provinsi Papua. Akhirnya keributan kecil pun terjadi di dalam kantor KPUD Kabupaten Puncak Papua.

Menurut masa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak, KPU telah di bayar oleh pihak Elvis Tabuni, namun pihak KPUD sendiri membantahnya, KPUD melepaskan masalah ini ke rumah tangga partai Gerindra agar menyelesaikan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Gerindra, namun hal ini di tantang oleh wakil ketua DPD partai Gerindra Amir Mahmud dan Meninta KPUD menerima surat rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak. Hal ini tentu ini tentu saja tolak oleh KPUD kabupaten Mimika. Akhirnya KPUD kabupaten Mimika menyurati ketua DPP partai Gerindra, Prabowo Subyanto, agar masalah ini diselesaikan di internal partai partai, namun DPP partai Gerindra tidak merespon surat tersebut. dan menarik masalah tersebut ke dalam rumah tangga partai untuk menyelesaikan, maka masalah ini tidak akan menjadi besar seperti sekarang ini.

Menurut masa pendukung Simon Alom, keributan di dalam kantor KPUD pun semakin membesar dan tidak ditemukan titik terang antara Calon Bupati dan Wakil Bupati Simon Alom-Yosia Tenbak dan KPUD kabupaten Mimika, marah dan merusak Kantor KPUD kabupaten Mimika. Demikianlah konflik ini terus berlanjut, hingga melahirkan perang antara kedua massa

pendukung, tentunya akibatnya menelan korban jawa masyarakat yang tidak tahu apa - apa karena dampak konflik tersebut.

C. Konflik Politik Pemilihan Kepala Daerah dan Terjadinya Konflik Horizontal

Konflik politik secara horizontal pada pemilihan umum pada daerah di kabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara pendukung calon Bupati Simon Alom dan Elvis Tabuni. Menurut salah satu tokoh adat kabupaten puncak papua yaitu Naftali Waker, S.Sos, Konflik terjadi ini karena akibat dari dualism rekomendasi partai Gerindra kepada Dua calon Bupati, di mana partai Gerindra Mengeluarkan 2 (2) surat keputusan (SK), rekomendasi dari dewan pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra Provinsi Papua diberikan kepada Simon Alom, S. Sos sedangkan Rekomendasi dari dewan pimpinan Cabang (DPC) diberikan kepada Elvis Tabuni SE.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD kabupaten puncak terhadap surat rekomendasi yang di bawah oleh calon Bupati dan wakil bupati Simon Alom -Yosia Tenbak ini, membuat masa pendukungnya mengamuk dan merusak fasilitas kantor KPUD kabupaten puncak. saat itu aparat keamanan dari Brimob dan Polda papua yang berada ditempat berusaha untuk mengamankan kantor KPUD dengan mengeluarkan tembakan peringatan, namun tembakan itu di arahkan ke masa pendukung Simon Alom, Yosia Tenbak, Akhirnya 3 (tiga) orang terkena tembakan, akhirnya 2 (orang) tewas di tempat dan 1 (satu) orang lagi mengalami luka yang cukup serius. karena masa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak ini merasa bahwa aparat keamanan Brimob dan POLDA papua ini adalah pendukung Elvis Tabuni, mereka (masa pendukung Simon Alom, Yosia Tenbak) menyerang kediaman Elvis Tabuni, Akhirnya 19 (Sembilan Belas) orang masa pendukung calon Elvis Tabuni, Heri Dosinaen tewas ketika, selain terkena panah, tombak, parang dan kampak ada yang dibakar hidup- hidup dka satu rumah yaitu Dewa Wanambi dan Istrinya beserta seorang wartawan media cetak lokal. Hal ini di rasakan oleh masa pendukung Elvis Tabuni sebagai suatu perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi, karena faktor kepentingan politik dalam mencari kekuasaan atau jabatan politik yang tidak sehat yang terjadi di papua lebih khusus di daerah pegunungan papua.

Menurut Elvis Tabuni, penembakan yang di lakukan oleh aparat keamanan Brimob polisi Daerah papua itu adalah kehendak mereka (Brimob) sendiri, bukan atas perintah Elvis Tabuni. Akhirnya masa pendukung calon Bupati Elvis Tabuni Yosia Tenbak tidak menerima hal tersebut dan kembali menyerang di hari berikutnya hingga korban dari pendukung Simon Alom mencapai

29 Orang tewas belum termasuk yang luka - luka. Perang ini tidak berhenti sampai disitu saja, perang ini terus berlanjut di hari - hari berikutnya dalam jangka waktu satu tahun dan menelan jumlah 300 jiwa, serta meningeal dan 900 orang luka - luka serta kerugian harta dan benda milyaran rupiah.

D. Konflik Vertikal

Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten puncak papua, dapat dikatakan juga merupakan konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah kabupaten puncak jaya sebagai kabupaten Induk) dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang konflik politik vertikal pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten puncak papua. Hal ini menurut penulis cukup ekstrim untuk dijelaskan, namun karena ini merupakan hasil penelitian dan juga sebagai gambaran bagi para pembaca dapat memahami secara benar, penyebab terjadinya konflik politik horizontal di kabupaten puncak. Konflik itu bermula pada saat kabupaten puncak papua itu dimekarkan dari kabupaten puncak jaya, hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat dari puncak jaya adalah warga dari distrik ilaga (kabupaten puncak) dan beberapa distrik sekitar Ilaga yang mendapatkan posisi atau jabatan kabupaten puncak jaya akhirnya dengan semangat undang- undang 21 tahun 2001 prespektif dari otonomi khusus papua, mereka (Elit politik Lokal) mendesak pemerintah pusat agar segera memekarkan kabupaten puncak dari kabupaten puncak jaya.

Hampir semua responden yang selang peneliti wawancara selalu menyalahkan pemerintah pusat, sebagai akibat terjadinya konflik politik pemilihan umum kepala daerah di kabupaten puncak papua. Mereka mengatakan bahwa kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka persatuan dan kesatuan mereka itu dengan sendirinya akan terpisah, jumlah masyarakat kabupaten puncak, mereka semua pindah ke daerah - daerah disekitar kabupaten puncak, yaitu kabupaten nabire, kabupaten mimika, dan jayapura. Kehidupan seperti ini tentunya akan menghambat pembangunan di kabupaten puncak papua, sehingga penulis mengharapkan agar pemerintah sebagai representasi dari pada rakyat mencari resolusi untuk dapat tinggal dengan tenang di atas tanah leluhurnya sendiri dan membangunnya, menjadi kabupaten yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya.

5.2 Konflik Perang Suku Nduga Dengan Nduga

Dari pengalaman pemilu baik pemilu, terindikasi banyak timbul permasalahan yang berorientasi konflik. Konflik yang paling tajam justru terjadi pada era pesta demokrasi di Papua lebih daerah pengunungan Papua. Ketika melihat munculnya konflik sudah di prediksi sebelum memasuki era pilkada, karena daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada insentitas konflik antar kubu satu dengan kubu lain dalam saling mempertahankan sepihak pasangan calon. Karena di dalam pemilihan kepala dan wakil kepala Daerah jarak antara calon dengan pendukungnya sangat dekat. Demikian juga dengan pendukung satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya, emosi mereka lebih kuat dan karena lebih sulitnya dikendalikan emosi antar kedua belah pihak dan memaksakan diri sebagai pemenang. Selain itu, UU yang mengatur pilkada langsung juga memiliki cela bagi lahirnya konflik antar elit sesama Papua untuk mencari kekuasaan melalui partai politik, akhirnya menimbulkan konflik politik yang justru arah kekerasan. Karena pintu pencalonan di dalam pilkada melalui partai politik atau gabung dari partai politik. Konflik elit politik lokal dalam pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala daerah kerap terjadi umumnya dualisme partai politik atau satu partai dua pencalonan dalam pemerian rekomendasi kepada pasangan calon. Karena sebab - sebab yang muncul konflik politik lokal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dalam orientasinya perebutan kekuasaan atau hambatan di pemerintahan dan kedudukan yang dianggap langkah dalam masyarakat. Termasuk sebab munculnya konflik adalah nafsunya berkuasa atas menguasai orang lain.

Konflik politik secara horizontal yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Nduga adalah konflik yang terjadi kalangan masyarakat di sesama suku nduga dengan suku nduga, yaitu Yairus Gwijangge dengan Onarigen Kelnea. Terjadi konflik tersebut awalnya adalah pada saat melakukan pleno penetapan bupati yang terpilih sesuai dengan proses demokrasi dalam penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena tidak sesuai harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga terjadi permasalahan - permasalahan yang cukup serius, ketika dalam mengambil keputusan tersebut. Karena di Papua ketika pada pesta demokrasi justru mengakhiri dengan perang suku antar keluarga. Terjadi perang suku tersebut terjadi berkepanjangan itu terjadi ketika pendukung Bupati dan DPRD Nduga. Terjadinya konflik ini di picu dari pembagian daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu legislatif di kabupaten Nduga. DPRD menuding

Bupati setempat mengeluarkan keputusan terkait dapil tanpa melibatkan pihak legislative. konflik terus semakin memanas antara pendukung Bupati dan DPRD.

Komisi pemilihan Umum kabupaten Nduga dipapua diboikot oleh perwakilan partai politik setempat, sehingga tidak melakukan pengumuman daftar calon sementara (DPCS) untuk pemilihan Bupati dan DPRD setempat. Sehingga kantor KPU di kabupaten Nduga di palang, tidak bisa buat apa - apa, karena kantor KPUD di kabupaten Nduga sementara di tutup. Sehingga parpol disana bersepakat untuk tidak ada yang daftar - daftar Anggota KPU. saat itu pihak - pihak terkait sedang melakukan pertemuan dengan kementerian dalam negeri, kementerian kordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan, KPU provinsi papua, KPU kabupaten Nduga serta Musyawarah pimpinan Daerah (Muspida) setempat.

A. Akar Konflik pendukung Bupati Yairus Gwijangge dan DPRD Kab.Nduga.

Konflik Horizontal di kabupaten Nduga berawal karena di picu karena masalah rapat kordinasi penetapan jumlah distrik, daerah pemilihan dapil, daftar pemilihan (DAPIL), daftar pemilih tetap (DPT), dan jumlah kursi di Dewan untuk pemilu 2014 pada 23 maret 2013 vdi sala satu Hotel ternama di kota wamena, kabupaten Jayawijaya. Saat itu rapat di gelar oleh KPU setempat, tidak ada titik temu antara pihak DPRD Nuga (legislatif) dan Bupati Kabupaten Nduga (Eksekutif) soal perubahan untuk 2014 nanti. Ujungnya, Pembicaraan tersebut dan kekerasan fisik pun terjadi. Akibatnya, kepala bagian tatausaha Kabupaten Nduga Yustinus Gwijangge tewas, karena kena tanjam. Sejak saat itu mulai laporkan telah terjadi perang suku atau konflik horizontal terjadi dikampung Yilekma dengan 1 orang korban nyawa, puluhan rumha hangus terbakar, ratusan orang luka - luka. Masalah ini terus berupaya untuk mengat tetapasi oleh pihak - pihak yang berkompeten tetapi tidak kunjung menyelesaikan konflik tersebut. sehingga buntutnya maslah ini menyebar ke daerah lain di mana masyarakat yang tinggal di daerah - daerah lainnya. Karena pada 29 mei 2013 salah satu anggota DPRD kabupaten Nduga di bunuh oleh pihak kubu pendukung sebelah. Yang terbunuh diduga karena masalah tersebut. konflik tersebut memakan banyak korban jiwa manecapai 7 orang yang meningeal karena kena anak panah tajam akibat dari konflik kepentingan antara pendukung Buapati dan DPRD kabupaten Nduga. aktivitas pemerintah kabupaten Nduga tidak berjalan alaias macet total.

B. Penyebab Terjadinya Konflik Perang Sesama Suku

Konflik yang merupakan suatu realitas sosial akibat adanya antar elit peristiwa korban nyawa manusia. Di jadikan moment politik untuk melakukan strategi oleh chaos oleh elit politik lokal sehingga konflik di masyarakat tidak dapat dihindari. Sehingga sebagai realitas politik kepentingan yang terjadi di masyarakat memang ada kelompok menghendak agar konflik pecah. Kelompok elit lokal dalam kepentingan untuk mempersoalkan pembagian kekuasaan bagi masyarakat.

Karena terjadinya konflik ini pihak Legislatif dan Eksekutif pemerintah Kabupaten Nduga provinsi Papua dimana bahwa asal mulanya konflik ini terjadi di tengah - tengah masyarakat di Nduga dimulai rapat koordinasi penetapan daerah pemilihan (dapil), penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten Nduga Periode 2014 - 2019. Dua kelompok yang bertikai di sinakma pingiran kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pendukung Bupati Nduga dengan Pendukung DPRD mengakibatkan 8 orang meninggal dari kedua belah pihak dalam insiden konflik kedua kubu. Faktor terjadinya konflik perang antara kubu bupati dengan DPRD Nduga, adanya pemekaran yang ditolak oleh DPRD kabupaten Nduga, sehingga pemicu pertikaian antar kelompok warga masyarakat di Nduga itu sendiri. Ketika pada saat rapat koordinasi tersebut terjadi pembunuhan dari pihak Legislatif ke pihak Eksekutif salah satu anggota DPRD kabupaten Nduga, serta pelaku pembunuhan Inisial ET, Anggota DPRD kabupaten Nduga 29 Mei 2013. Terjadi konflik pembunuhan itu, situasi memancing bentrokan antar kelompok warga terjadi. Pertikaian dua kelompok warga pendukung Bupati Kabupaten Nduga dengan Pendukung DPRD kabupaten Nduga berawal ketika Bupati Nduga Yairus Gwijangge melakukan pemekaran kampung dan distrik tanpa persetujuan dimekarkan menjadi 32 Distrik dan 211 Kampung. Namun pemekaran itu di tolak oleh DPRD Nduga karena data yang di sepakati adalah fiktif. Akibat dari saling mempertahankan argumentasi dalam rapat terjadi bentrokan yang terjadi di sinakma, pingir kota Wamena, 8 warga masyarakat Nduga meninggal Dunia dalam konflik tersebut.

5.4 Resolusi Konflik Penyelesaian Masalah

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berinti primordial sulit di picahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul interaksi rumit antar kekuatan yang berbeda di samping variabel kondisi sosial budaya di wilayah kabupaten yang berada di daerah konflik, di Nduga,

Puncak papua, Intan jaya dan Timika. Pola penyelesaian konflik disuatu daerah tidak mungkin di terapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan penyelesaian masalah berbagai peristiwa perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori - teori konflik universal, tetapi juga perlu menggunakan pradigma lokal di beberapa daerah konflik agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi nilai dan tatanan kehidupan masyarakat di papua. Faktor - faktor sebagai pendukung analisis pemecahan masalah konflik tersebut antara lain: aktor, isu, faktor penyebab,lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/posisi sifat,kekerasan, wialayah, fase atau intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya. Cara penyelesaian konflik lebih cepat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di papua lebih khusus daerah pengunungan, jika menggunakan metode penyelesaian masalah tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat adat yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat yang ada di daerah konflik di Nduga, Mimika, Intan Jaya, Puncak Papua dan Mimika. Diantara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang terpelihara dan mempertahankan adalah gotong royong dan kerja sama unntuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah (problem solving).

Hal yang cepat menyelesaikan masalah konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan hukum adat yyang berlaku dimasyarakat karena selama ini sudah budaya dalam masyarakat.oleh karena itu,hukum adat merupakan sasuat yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa diakui juga oleh hukum positif dan pemerintah daerah.dengan hukum adat ini diharapkan resolusi konflik penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dapat terwujud,bisa diterima semua kelompok sehingga bisa menjadi Damai dan harmonis di dalam masyarakat.

a. Penyelesaian Konflik Horizontal Secara Hukum positif

Dari tahun ke tahun sejak tahun 1997 hingga saat ini, beberapa suku yang ada di daerah pengunungan yang mendiami di kabupaten mimika papua hampir setiap pecan terjadi perang antar saudara atau antar suku di kabupaten mimika dan beberapa Daerah lain, seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak papua dan Mimika,namun perang tersebut sulit untuk menyelesaikan atau pencegahannya. Meskipun konflik perang antar suku berhasil di hentikan oleh pemerintah Daerah, Aparat Keamanan (kepolisian TNI),maupun pihak Gereja, tetapi hanya bersifat sementara atau jangka

pendek. sedangkan untuk melakukan penyelesaian untuk jangka panjang sulit dirahi, karena penerapan penyelesaian perang suku yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Aparat keamanan, pihak Kepolisian, pihak Gereja, dan Unsur - unsur yang lain tidak melakukan pendekan melalui hukum positif, pada hal harapan masyarakat pada umumnya pelaku harus ditangkap kemudian diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini adalah Negara yang berdasarkan Hukum. oleh karena itu, hukum yang ada di Negara ini harus di manfaatkan secara baik dan berkeadilan dalam menyelesaikan konflik yang sengketanya yang menimbulkan korban nyawa masyarakat hanya karena kepentingan elit politik lokal yang ada di papua.

Karena keinginan dan harapan besar masyarakat papua lebih khusus beberapa daerah konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwasannya pemerintah daerah setempat baik eksekutif maupun legislative bekerjasama untuk menyusun peraturan daerah (perda), kemudian pasal - pasal tertentu mengatur tentang penyelesaian tentang perang suku atau konflik politik lokal yang sering terjadi pada pemilihan berlangsung agar pelakunya harus di proses secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik ini. Agar pelaku di proses secara aturana atau perda yang mengatur konflik, kemudian pelaku di proses hukum seberat- berat, dengan melihat itu masyarakat lain yang mau pernah atau konflik horizontal dengan sendirinya takut berulang kembali menciptakan konflik horizontal di masyarakat. bahwa terkait dengan penanganan konflik berkepanjangan di beberapa daerah kabupaten kota yang motif dengan setiap moment pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu penanganannya tidak beggitu jelas, karan penulis melihat ketidak seriusan dan kelemahan dari pemerintah daerah dan hukum positif harus bertindak karena, melalui peraturan daerah (perda), kemudian hukum positif harus ditegakkan dan masyarakat siapapunyang menjadi pelaku konflik harus di proses secara hukum dan di hukum seumur hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan penanganan konflik tidak hanya dari satu pihak tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat yaitu pemerintah daerah setempat, LSM, tokoh Gereja, Tokoh adat, Kepala-kepala Suku dan tokoh Masyarakat dan para Intelektual yang ada di daerah tersebut. karena lembaga- lembaga atau LSM yang ada di beberapa daerah dan DPRD mendorong untuk peraturan daerah (perda), dalam penanganan konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering terjadi di beberapa daerah atau kabupaten pengunungan. Perda bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan keamanan, sehingga ada payung Hukum daerah yang menjadi acuan dalam mengatasi konflik di daerah - daerah konflik

agar ketika di konflik atau perang antar suku terjadi karna kepentingan politik dan lain sebagainya setiap pelaku tersebut di proses secara hukum yang berlaku di Negara ini. bahwa pemerintah daerah baik Eksekutif dan Legislatif sebagai representasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, harus tegakan hukum positif, disisi lain harus pengawasan dari pemerintah daerah, sebab penulis melihat pemerintah daerah belum pernah menerapkan konsep pengawasan dalam penyelesaian konflik yang sering terjadi papua dalam konsep mekanisme secara hukum positif. Pemerintah, penegak hukum (polisi atau jaksa), tidak mampu menegakan hukum atau tidak berwibawa, kemudian masyarakat juga belum memahami hukum positif atau pura-pura tidak tahu hukum positif itu. Secara kongkretnya setiap pelaku konflik berhasil ditangkap kemudian diproses secara hukum positif. Hal itu yang harus di lakukan oleh beberapa kabupaten Daerah konflik horizontal. Karena dalam proses penyelesaian permasalahan konflik seperti ini, permasalahan tersebut tidak pernah menyelesaikan dengan baik di papua lebih khusus beberapa kabupaten atau kota. pemerintah daerah setempat gagal atau terlambat menangani setiap konflik perang suku yang terjadi di beberapa daerah konflik perang suku yang terjadi karena kepentingan politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. pemerintah daerah baik lembaga- lembaga pemerintah harus lebih tegas terutama perang suku, karena dampak dari perang suku memakan korban jiwa masyarakat sehingga pelaku aktor perlu tindak lanjuti proses hukum sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, karan kami tahu bahwa Negara ini merupakan Negara hukum, maka setiap pelanggaran atau setiap konflik yang terjadi harus menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Negara ini, terutama pelaku akan sendirinya akan muncul kesadaran, karena itu harus mengedepankan hukum positif.

Karena sesungguhnya penyelesaian atau untuk menghentikan konflik antar etnis di beberapa daerah konflik, pemerintah daerah setempat harus membangun pendekatan dengan masyarakat, dengan tujuan sangat mudah untuk mendamaikan setiap persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat kemudian bisa interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendamaikan konflik tersebut. dengan demikian memahami setiap pemahaman yang diberikan pemerintah sehingga terjadi proses perdamaian secara cepat. karena mengenai penyelesaian atau pemecahan masalah konflik yang terjadi di beberapa daerah konflik, baik puncak papua, Intan jaya, Nduga dan Mimika pemerintah agak sulit untuk menyelesaikan atau mendamaikan konflik, karena jika masyarakat mau mendamaikan konflik - konflik yang bertikai tentu diselesai secara Hukum adat dan mengabaikan atau menomorduakan hukum

positif.pemerintah melakukan upaya untuk mendamaikan konflik antar etnis hanya bisa jangka pendek, sedangkan sangat sulit untuk mendamaikan konflik jangka panjang.lebih sulitnya lagi adalah masyarakat sendiri yang berkonflik di mana saat perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, kemudian yang mendamaikan mereka yang bertikai, adalah pemerintah maupun hukum positif (kejaksaan dan kepolisian). Ketika sudah melakukan perdamaian dengan mengadakan penandatanganan dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa, tidak akan mengulangi lagi dan kemudian penandatanganan ini dilakukan di atas materai dengan disaksikan oleh pemerintah Daerah (Bupati),kejaksaan dan kepolisian, akan tetapi lebih parah lagi mulai berperang mereka yang tadinya sudah melakukan penandatanganan di depan pemerintah Daerah dan lembaga- lembaga masyarakat yang pemerintah yang berlaku di lingkungan masyarakat.

B. Penyelesaian Konflik Secara Hukum Adat

Bahwa setiap konflik horizontal karena kepentingan politik lokal yang terjadi papua lebih khusus beberapa daerah pegunungan,penanganannya tidak begitu jelas, karena ketidak seriusan dan kelemahan dari pemerintah daerah dan termasuk keamanan sebagai pelindung dan pengayomi masyarakat setempat. Seharusnya pemerintah daerah dan hukum adat juga harus bertindak tegas dalam penanganan konflik perang suku pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi dipapua. Caranya melalui penyusunan peraturan daerah hukum adat yang berlaku bisa kemudian di perdakan agar setiap konflik kepentingan politik elit lokal hukum adat berlaku untuk menyelesaikan perang antar suku yang terjadi di papua lebih khusus di papua bagian dari pegunungan.penganganan konflik perang antar suku tidak hanya dari satu pihak tetapi harus melibatkan semuaelemen masyarakat yaitu pemerintah daerah setempat,ESM, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan Kepala Suku, dan tokoh masyarakat, agar beberapa hal yang menurutnya mencari solusi untuk penanganannya untuk didaerah konflik anatara lain.

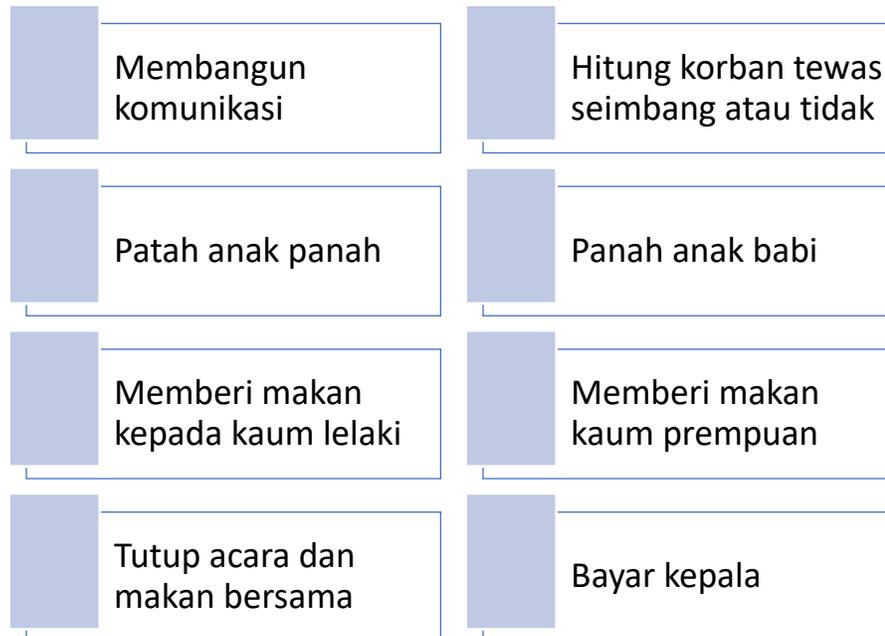
- a. .Hukum harus di tegaska, pelaku konflik perang antar suku harus di tangkap dan masukan dipenjarah diberi hukuman sesuai dengan undang- undang yang berlaku.
- b. Pihak yang berwenang tidak boleh melepaskan atau membebaskan pelaku, bila pihak keluarga yang datang membayar untuk mengeluarkan dari penjara.
- c. c.pemerintah daerah (Bupati) tidak boleh membantu danah untuk membayar kepala karena dana itu untuk membangun pembangunan daerah setempat dan keamanan.
- d. Kurangnya pengawasan dan penanganan dari pemerintah daerah setempat san keamanan.

- e. Bila terjadi konflik horizontal dalam kepentingan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, elemen masyarakat harus bersatu untuk menyelesaikan secara keseluruhan bukan hanya salah satu pihak namun kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian konflik horizontal yang dilakukan masyarakat pengunungan tengah papua, setelah perang antar suku terjadi karena penyebab kepentingan konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selesai kemudian melakukan suatu upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik horizontal perang antarsuku secara hukum adat, maka diwajibkan untuk mengikuti beberapa proses atau tahapan- tahapan secara adat mereka. Tahapan - tahapan tersebut secara berurutan dan penyelesaian dapat terlibat di bawah.

Bagan 4.1

Tahapan penyelesaian konflik horizontal secara Hukum Adat



Tahap pertama, membangun komunikasi. Tahap ini masing - masing pelaku penyelegara perang/ pelaku konflik horizontal saling membangun komunikasi secara aktif dan

dinamis, terutama berkaitan dengan bagaimana cara melakukan perdamaian itu sendiri bersama keluarga korban. Dengan demikian, membangun interaksi dan komunikasi yang baik, maka perdamaian pun bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Tahap kedua, hitung korban tewas untuk mengetahui seimbang atau tidak merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa beberapa orang yang korban dalam konflik tersebut dalam perang baik kubu A dan kubu B jika ternyata sudah seimbang, maka proses selanjutnya di persiapkan untuk patah panah. Apabilah korban nyawa masyarakat lebih atau belum seimbang, maka keputusan tertinggi ada di keluarga korban. Dan masing-masing penyelenggara perang atau konflik menawarkan kepala keluarga korban untuk membayar kepala setelah melakukan perdamaian dilanjutkan. Terkadang penawaran tersebut ditolak oleh korban, maka perang bisa dilanjutkan.

5.5 Bentuk Bentuk Konflik

Dalam perjalanan politiknya, Papua telah mengalami konflik horizontal dalam pesta demokrasi di Papua. Dari pengalaman pemilu, baik pemilu anggota DPR dan DPD dan DPRD serta Persiden dan Wapres, di tambah Pilkada, teridentifikasi banyak banyak timbul permasalahan yang berpotensi konflik. Bentuk konflik yang paling tajam justru terjadi pada pemilihan kepala daerah.

1. Konflik Horizontal

Setiap perang suku yang kerap terjadi di kabupaten, ketika momen-momen pesta demokrasi para calon kepala daerah cerdas dan bersaing untuk puncak Papua menyumbangkan uang yang cukup besar ratusan sampai miliaran rupiah. Bagi suku yang berperang apalagi waktu diadakan acara bayar kepala, tentu para calon kepala daerah mengeluarkan nilai uang yang cukup besar. Itu artinya para kepala daerah membeli suara masyarakat kemudian masyarakat pun bungkus suaranya untuk calon kepala daerah yang menyumbang uang.

Jual beli suara kerap terjadi antara masyarakat dengan calon kepala daerah yang punya uang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal tersebut.

Konflik horizontal antar pasangan bakal calon Bupati Kubu *Elvia Tabuni* dari suku *Dani* dengan Kubu *Simon Alom* dari suku *Amungme* di kabupaten Puncak Papua, sesungguhnya

suatu konflik kepentingan yang sengaja dibangun atau diciptakan oleh orang - orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Tentu saja kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau aktor konflik dalam berpolitik. Karena mereka dua memiliki kepentingan yang sama untuk partai politiknya dan kedua tokoh ini adalah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di motori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik itu.

Konflik yang terjadi di kabupaten puncak Papua yaitu pada tanggal 31 Juli 2021, di mana diawali perang suku antara *Simon Alom* dari *suku Amungme* sebagai calon Bupati dan *Elvis Tabuni* dari *suku Dani* menimbulkan kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran *Simon Alom* Sebagai Calon Bupati puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, *Elvis Tabuni* (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut Dukungannya.

Yang menjadi pemicu konflik di kabupaten Puncak adalah pimpinan partai yang dan pimpinan KPUD. Hal ini disebabkan karena pemimpin partai di tingkat Pusat maupun pimpinan partai (Gerindra) di tingkat daerah (provinsi) mengeluarkan rekomendasi kepada dua pasangan calon yang berbeda tanpa saling berkoordinasi. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Timika, yaitu pasangan calon Simon Alom dikomendasikan langsung dari Dewan Pimpinan Partai Gerindra di pusat, sementara pasangan calon Elvis Tabuni dikomendasikan oleh pimpinan partai Gerindra di tingkat provinsi. Dengan demikian akar konflik sebenarnya berasal dari dalam diri partai Gerindra (antara pimpinan partai di tingkat pusat dan pimpinan partai di tingkat Provinsi).

Konflik sebagai suatu realitas sosial akibat konflik antar elit, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu dijadikan momentum politik untuk merancang chaos oleh elit politik lokal sehingga konflik dalam masyarakat terus berlanjut, demi dan untuk pembagian kekuasaan di tingkat elit.

Pihak Legislatif dan Eksekutif pemerintah Kabupaten Nduga provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi untuk penetapan daerah pemilihan (dapil), penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten Nduga Periode 2014 - 2019. Dua

kelompok yang bertikai (pendukung bupati Nduga dan pendukung DPRD Nduga) di Sinakma, pinggiran kota Wamena mengakibatkan 8 orang meninggal dari kedua belah pihak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik berupa perang antara kubuh bupati dengan DPRD Nduga terutama disebabkan oleh pemekaran wilayah, yang ditolak oleh DPRD kabupaten Nduga. Pertikain dua kelompok warga pendukung Bupati Kabupaten Nduga dengan Pendukung DPRD kabupaten Nduga berawal ketika Bupati Nduga Yairus Gwijangge melakukan pemekaran kampung dan distrik tanpa persetujuan dimekarkan menjadi 32 Distrik dan 211 Kampung. Namun pemekaran itu di tolak oleh DPRD Nduga karena data yang di sepakati adalah fiktif.

2. Konflik Vertikal

Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten Puncak Papua, dapat di katakan sebagai konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah kepentingan daerah (pemerintah kabupaten Puncak Jaya sebagai kabupaten Induk) dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ada beberapa sudut pandang yang dapat di gunakan untuk menjelaskan tentang konflik politik vertikal pada pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Puncak Papua.

Perlu dijelaskan bahwa konflik horizontal maupun konflik vertikal bermula pada saat kabupaten Puncak Papua dimekarkan dari kabupaten Puncak Jaya, hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat dari Puncak Jaya adalah warga dari distrik Ilaga (kabupaten Puncak) dan beberapa distrik sekitar Ilaga yang mendapatkan posisi atau jabatan kabupaten Puncak Jaya akhirnya dengan semangat undang- undang 21 tahun 2001 prespektif dari otonomi khusus Papua, mereka (Elit politik Lokal) mendesak pemerintah pusat agar segera memekarkan kabupaten Puncak dari kabupaten Puncak Jaya.

Hampir semua responden yang diwawancarai selalu menyalahkan pemerintah pusat, sebagai lakon utama terjadinya konflik politik horizontal maupun konflik vertical pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Puncak Papua. Mereka mengatakan bahwa kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka persatuan dan kesatuan mereka itu dengan sendirinya akan terpisah, jumlah masyarakat kabupaten Puncak, mereka semua pindah ke daerah - daerah disekitar

kabupaten Puncak, yaitu kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan Jayapura. Kehidupan seperti ini tentunya akan menghambat pembangunan di kabupaten Puncak Papua.

5.6 Faktor Penyebab Konflik

Faktor-faktor penyebab konflik di antaranya adalah faktor demografi dan faktor geografi. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada konflik identitas. Kerusakan bermula dari akibat ketidakpuasan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran *Simon Alom* Sebagai Calon Bupati Puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, *Elvis Tabuni* (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut Dukungannya.

Berdasarkan temuan lapangan terdapat paling tidak lima sumber potensi yang dapat memicu konflik pilkada.

Pertama, konflik yang bersumber dari satu partai Gerindra yang mendukung dua atau tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, karena pimpinan partai Gerindra pusat dan daerah tidak saling mengecek atau membangun komunikasi.

Kedua, konflik bersumber dari KPUD yang tidak mengambil keputusan yang professional sesuaiketentuan undang-undang.

Ketiga, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan dan kedaerahan.

Ke empat, konflik bersumber dari kampanye hitam (black companying) antar calon, dan

Kelima, konflik bersumber dari ketidak setujuan salah satu calon terhadap panitia pemilihan daerah(PPD) yang di pilih oleh KPUD di daerah tersebut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah di Puncak Papua adalah perbedaan pandangan dan rekomendasi antara KPUD dengan PDD/C. Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten Puncak Papua adalah konflik yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Puncak Papua (KPUD) dengan pengurus partai Gerindra baik antara Dewan pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra kabupaten Mimika dan Dewan pimpinan Daerah partai Gerindra (DPP).

Menurut ketua KPUD kabupaten Mimika *Yorin Tabuni*, konflik antara KPUD dengan pengurus partai Gerindra bermula saat pendaftaran yang di lakukan oleh calon Bupati *Simon Alom* dan *Yosis Tenbak*, tepatnya Hari Sabtu 31 Juli 2012, *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* mendatangi kantor KPUD kabupaten Puncak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum, kepala daerah kabupaten Mimika. *Yorin Tabuni* menolaknya, dengan alasan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPP provinsi Papua yang digunakan oleh *Simon Alom* untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum adalah tidak sah.

Dan mengatakan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPC yang sah, yang pada saat itu telah digunakan oleh pasangan calon bupati *Elvis Tabuni* dan *Heri Dosinaen* untuk mendaftarkan diri di KPUD pada hari sabtu 27 Juli 2012. Menurut *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*, KPUD menolak surat Rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* pada saat itu juga, tanpa melalui proses. Seharusnya KPUD menerima terlebih dahulu surat rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*.

Kemudian dilakukan pembicaraan - pembiraan antara KPUD dengan pihak pengurus oleh partai. Penolakan yang dilakukan oleh KPUD terhadap surat rekomendasi DPP partai Gerindra yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia tenbak* ini, membuat wakil ketua DPP partai Gerindra provinsi Papua *Amir Mahmud Madubun* yang saat pendafran itu hadir di kantor KPUD kabupaten Mimika marah dan mengancam akan mengugat KPUD kabupaten Puncak Papua ke KPU provinsi Papua. Akhirnya keributan kecil pun terjadi di dalam kantor KPUD Kabupaten Puncak Papua.

Menurut masa pendukung *Simon Alom* dan *Yorisia Tenbak*, KPU telah di membayar pihak *Elvis Tabuni*, namun pihak KPUD sendiri membantahnya, KPUD melepaskan masalah ini ke rumah tangga partai Gerindra agar menyelesaikan sesuai Agaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga partai Gerindra, namun hal ini di tantang oleh wakil ketua DPD partai Gerindra *Amir Mahmud Madubun* dan Meminta KPUD menerima surat rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*. Hal ini tentu tolak oleh KPUD kabupaten Mimika.

Akhirnya KPUD kabupaten Mimika menyurati ketua DPP partai Gerindra, Prabowo Subyanto, agar masalah ini diselesaikan di internal partai partai. Namum DPP partai Gerindra tidak merespon surat tersebut dan menyerahkan masalah tersebut ke dalam rumah tangga partai untuk menyelesaikan sendiri.

Menurut masa pendukung *Simon Alom*, keributan didalam kantor KPUD pun makin membesar dan tidak ditemukan titik-terang antara Calon Bupati dan Wakil Bupati (*Simon Alom & Yosia Tenbak*) dan KPUD kabupaten Mimika. Masa pendukung *Simon Alom* marah dan akhirnya merusak Kantor KPUD kabupaten Mimika. Demikianlah konflik ini terus berlanjut di tingkat masa pendukung, hingga melahirkan perang antara pendukung kedua pasangan calon tersebut. Konflik ini menelan korban jiwa masyarakat yang tidak tahu apa – apa.

Konflik politik secara horizontal pada pemilihan umum pada daerah di kabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara pendukung calon Bupati *Simon Alom* dan *Elvis Tabuni*. Menurut salah satu tokoh adat kabupaten Puncak Papua yaitu Naftali Waker S, Sos, :”

“Konflik ini terjadi karena akibat dari dualisme rekomendasi partai Gerindra kepada Dua calon Bupati, di mana partai Gerindra Mengeluarkan 2 (2) surat keputusan (SK), rekomendasi dari dewan pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra Provinsi Papua diberikan kepada *Simon Alom, S. Sos* sedangkan Rekomendasi dari dewan pimpinan Cabang (DPC) diberikan kepada *Elvis Tabuni SE*”.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Puncak terhadap surat rekomendasi yang di bawah oleh calon bupati dan calon wakil bupati (*Simon Alom & Yosia Tenbak*), membuat masa pendukungnya mengamuk dan merusak fasilitas kantor KPUD kabupaten Puncak. Saat itu aparat keamanan dari Brimob dan Polda Papua yang berada ditempat berusaha untuk mengamankan kantor KPUD dengan mengeluarkan tembakan peringatan, namun tembakan itu di arahkan ke masa pendukung *Simon Alom, Yosia Tenbak*, Akhirnya 3 (tiga) orang terkena tembakan, dimana 2 (orang) tewas di tempat dan 1 orang mengalami luka serius. Oleh karena masa pendukung *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* ini merasa bahwa aparat keamanan Brimob dan Polda Papua adalah pendukung *Elvis Tabuni*, mereka (masa pendukung *Simon Alom & Yosia Tenbak*) menyerang kediaman *Elvis Tabuni*, Akhirnya 19 (Sembilan Belas) orang masa pendukung calon *Elvis Tabuni, Heri Dosinaen* tewas ketika, terkena panah, tombak, parang dan kampak dan ada yang dibakar hidup- hidup dalam satu rumah yaitu Dewa Wanimbi dan Isterinya beserta seorang wartawan media cetak lokal.

Hal ini di rasakan oleh masa pendukung *Elvis Tabuni* sebagai suatu perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi, karena faktor kepentingan politik dalam mencari kekuasaan atau jabatan politik yang tidak sehat yang terjadi di Papua lebih khusus di daerah penguasaan Papua.

Menurut *Elvis Tabuni*, penembakan yang di lakukan oleh aparat keamanan Brimob polisi Daerah Papua adalah kehendak mereka (Brimob) sendiri, bukan atas perintah *Elvis Tabuni*. Akhirnya masa pendukung calon Bupati *Elvis Tabuni* dan calon wakil bupati *Yosia Tenbak* tidak menerima hal tersebut dan kembali menyerang di hari berikutnya hingga korban dari pendukung *Simon Alom* mencapai 29 Orang tewas belum termasuk yang luka - luka. Perseteruan ini berlanjut di hari - hari berikutnya dalam jangka waktu satu tahun dan menelan jumlah 300 jiwa meningeal dan 900 orang luka - luka serta kerugian harta dan benda miliaran rupiah.

Kemudian faktor utama yang menjadi konflik pada saat pemilihan kepala daerah adalah pada saat rekrutmen tingkat TPS,PPS, KPPS,KPU dan Bawaslu. Ketidak konsistensinya kerja yang tidak berprofesional sehingga terkadang mereka yang penyelegarah inipun menjadi aktor menciptakan konflik, karena lebih pendekatan keluargaisme dan sukuisme.

Kemudian menyangkut penyelegarah KPU sampai dengan tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjunjung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang - kadang berubah. Karena saat penyelegara ini, saat rekrutment timsel itu orang - orang dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a,Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dari pusat.

Kemudian dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga timsel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesan itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut.

Hal ini perlu diubah sehingga hasil rekapan - rekapan itu bisa model berita acara A,B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki. Seharusnya hasil yang di tingkat TPS tingkat

yang paling bawah itu yang buat berubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi mereka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setiap tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan - perubahan itulah yang terjadi pengalihan suara masuk dalam kepentingan para elit. Orang yang tidak ada suara itu tiba- tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung, kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehingga orang - orang yang duduk dilembaga -lembaga KPU mereka juga tahu,bahwa mereka salah mereka di pecat melui proses hukum atau DKPP pecat mereka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang - orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang dan mereka tetap punya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang - orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalui prosedur hukum oleh penyelegarah. Kemudian masyarakat akar rumput atau pribumi tidak menerima dengan hasil pleno yang di putuskan oleh tingkat KPU tingkat kota, provisini dan pusat tidak sesuai hasil suara yang di pilih oleh masyarakat setempat, sehingga menciptakan konflik horizontal. Karena parah kadidat yang satu merasa di rugikan sehingga pihak yang merasa di rugikan ini mengonpori masa kemudian saling mempertahankan kubu yang merasa di korbakan dengan kubu yang lain. Sehingga terjadi perang antar suku yang berkepangan selalu terjadi di Papua.

Contoh fakta yang terjadi di Papua yaitu pada penetapan calon terpilih paksa putusan MK, juga terdapat tiga pengalaman konflik kekerasan, yaitu: kerusakan ketidakpuasan terhadap putusan MK yang menolak gugatan pasangan calon bupati *Yahukimo* dan melalui dua orang pada Februari 2011,kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap putusan MK yang menolak gugatan pasang calon bupati *Lanny Jaya* dan menganguskan bangunan private dan publik pada September 2011, serta kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap MK yang menolak gugatan pasangan calon Gubernur yang kalah di kota manokari pada Desember 2011. Pada tahapan penetapan bakal calon terpilih terpaksa putusan MK lazim pihak pasangan yang kalah dan tidak terima dengan putusan MK, mengorganisir masanya untuk mengintimidasi maupun mencoba menginvestigasi hasil melalui aksi kekerasan.

Faktor utama menjustifikasi penolakan terhadap putusan MK, umumnya terjadi karena pendekatan terhadap sistem pemilihan yang di lakukannya dan karena sistem pemilihan di Papua lebih khusus di Timika dimana mereka masih menggunakan sistem perhitungan manual walaupun hak memilih sesuai hati nurani, namun pendekatannya tetap saja di mana mereka melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang mereka memberikan sura. Dimana satu pihak mengklaim bahwa seharusnya yang menang bersangkutan mendapatkan suara dari kelompok atau suku tertentu yang melihat catat sebagai perolehan suara bagi lawan politik.

Mobilisasi massa ini yang umumnya tidak dapat dikendalikan dan menghadirkan tindakan-tindakan yang anarkis. Dengan sejumlah massa yang di mobilisasi masyarakat menciptakan konflik perang suku antara kubu Si A dan kubu Si B dan korbannya adalah masyarakat biasa.

5.7 Resolusi Konflik

Berdasarkan temuan bentuk dan faktor-faktor penyebab konflik tersebut di atas, penulis mengharapkan agar pemerintah sebagai representasi dari pada rakyat mencari resolusi perdamaian agar masyarakat dapat tinggal dengan tenang di atas tanah leluhurnya sendiri dan membangunnya menjadi kabupaten yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya.

Perlu dipertimbangkan kembali model format pilkada asimetris yang diusulkan oleh LIPI. Format ini didasarkan pada fakta kondisi daerah (de facto) yang dapat dilihat dari aspek sosial berupa kemampuan sumber daya manusia daerah yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan), ekonomi yang tercermin dari kemampuan keuangan daerah, dan memperhitungkan aspek budaya.

Pada kajian LIPI 2012 fokus pada evaluasi format Pilkada di tingkat kabupaten/kota, sehingga menghasilkan indikasi perlunya Pilkada Asimetris di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Kemudian pada kajian LIPI 2013 fokus pada evaluasi format Pemilukada di tingkat provinsi, menemukan permasalahan mendasar mengenai desain institusional Pilkada di dalam Undang-

Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menggunakan model simetris yaitu menyeragamkan kebijakan Pilkada untuk semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Padahal kondisi setiap daerah dari segi kemampuan sumber daya manusia dan keuangan daerah tidak merata, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil Pilkada diliputi berbagai masalah.

Pada kajian LIPI 2014, berdasarkan pada kajian sebelumnya, tim peneliti LIPI merekomendasikan model Pilkada di kabupaten/kota dan provinsi yang tepat untuk Indonesia disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah dan juga dan sejalan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif. Bahwa filosofi pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten/kota dan provinsi adalah untuk mendudukkan satuan pemerintahan daerah pada posisi yang kuat sebagai bagian struktur ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memperoleh legitimasi dari konstitusi dan bukan pemberian pemerintah pusat).

5.8. Dampak Pemekaran

Pemekaran Wilayah Papua telah disahkan berdasarkan uu nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi Papua selatan, dan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, juga UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan disahkannya tiga undang-undang tersebut, maka Papua saat ini terdiri dari lima provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya.

Pemerintah berpandangan terdapat beberapa urgensi sebagai dampak positif pembentukan ketiga provinsi baru di Papua, yaitu:

1. Alternatif percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tiap-tiap calon provinsi, pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat;
2. Upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien;

3. memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial;
4. memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan;
5. serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun kita melihat lebih khusus Papua yang terjadi dari provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan daerah dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi di Indonesia. Terlepas dari ragam analisa kualitas yang ditawarkan parah pihak, namun yang pasti, kerentanan konflik ini diyakini berdiri atas pondasi yang kompleks karena di Papua dalam perjalanan politiknya, selalu terjadi pemicu konflik horizontal di sepanjang periode tersebut, serangkain konflik kekerasan terjadi dengan beragam latar belakang persoalan karena pada tahapan ini, konflik kekerasan banyak disebabkan faktor kertersingugan antar massa pendukung calon. Ketika masa yang hendak, sedang atau sudah berkapanye, berpapasaan lalu saling melontarkan hinaan atau ejakan. Sehingga terjadi saling mempertahankan argumentasi untuk mempertahankan pihak yang satu dengan pihak lain. Akhirnya kubu masa satu denggan kubu masa yang lain membawah senjata tajam yang di pengang baik dengan panah maupun parang yang turut di bawah masa karena alasan instrument budaya, ataupun benda-benda keras seperti batu sehingga kerusuhan antar masa dan tidak bisa dihindari. Pemicu lain adalah karena janji politik yang tidak di penuhi para kadidat para caleg.

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh masyarakat Papua berkaitan dengan pemekaran wilayah baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupate/kota bahkan pemekaran distrik di tanah Papua, masyarakat orang asli Papua mengalami permasalahan - permasalahan yang cukup serius, ketika hadirnya pemekaran wilayah yang begitu ramai di tanah Papua. Ternyata kehadiran pemakaran wilayah, bukan membanngun orang Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua, akan tetapi pemekaran wilayah justru mendatangkan konflik sehingga menimbulkan konflik antara pro dan kontra, suku dengan suku lain, lain sebagainya untuk mempertahankan kepentingan politik di kalangan masyarakat lokal. Mengakibatkan menelan korban jiwa yang banyak di tanah papua karena kehadiran pemekaranr tersebut.

Dalam sejarah pemekaran, pernah terjadi konflik pemekaran wilayah provinsi Irian Jaya Tengah (sekarang Provinsi Papua Tengah) yang terjadi konflik pada tanggal 22 Agustus 2003 di Kabupaten Mimika, dalam konflik itu 6 orang tewas dan puluhan orang luka-luka.

Ada beberapa responden yang ditemui memberikan pandangan terkait pemekaran wilayah baru atau yang di singkat dengan Daerah Otonomi Baru (DOB), menjelaskan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya pembentukan pemekaran wilayah baik itu provinsi maupun Kabupaten/kota di wilayah Papua meskipun ada positifnya. Mereka tidak setuju karena karena perkembangan wilayah di Papua yang makin pesat, pada akhirnya berkembang dan menimbulkan konflik antara yang pro dan kontra di dalam masyarakat dan sering menjadi korban adalah masyarakat kecil.

Pemekaran wilayah di tanah Papua terjadi lebih karena untuk kepentingan elite-elite lokal yang ingin mendapat jabatan politik atau jabatan gubernur maupun Bupati/ Wali Kota. Elite-elite lokal mencari dukungan pada masyarakat untuk mendapatkan posisi tertentu yang kemudian akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan banyak menelan korban jiwa masyarakat.

Berkaitan dengan pemekaran wilayah provinsi, Kabupaten, Kota maupun Distrik yang sedang ramai dibicarakan di tanah Papua, ada responden yang menyatakan pendapatnya:

“saya tidak setuju atau tidak menerima dengan hati. Karena dengan hadirnya pemekaran wilayah baru baik itu di provinsi maupun provinsi Papua Barat, dengan sekarang ada lagi penambahan 4 provinsi baru di Papua. Kami masyarakat orang asli Papua khawatir dengan adanya penambahan pemekaran wilayah baru. Pemekaran akan memberikan dampak negatif yang berkepanjangan dalam kehidupan orang asli Papua atau masyarakat lokal di tanah Papua. Kami masyarakat Papua tidak mendapatkan keuntungan yang berarti, justru merugikan banyak orang bahkan dapat terjadi konflik yang akan membawa korban jiwa. Ia menilai bahwa dengan mekarnya wilayah di Papua terjadi karena kepentingan politik di mana orang beramai-ramai mengantar aspirasi ke pemerintah pusat hanya karena kepentingan segelintir orang elit lokal Papua tanpa melalui kesepakatan /mekanisme/ prosedur yang benar. Jika hal ini ditanyakan kepada masyarakat belum tentu masyarakat menerimanya dengan sepenuh hati. Elite politik lokal mengejar kepentingan jabatan saja, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Akan tetapi masyarakat tidak 100% menerima pemekaran wilayah baru di Papua karena kekhawatiran mereka akan terjadinya konflik seperti yang pernah terjadi di masa lalu seperti

konflik di antara masyarakat lokal di saat pemekaran wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, Distrik Ndugama dan Daerah - Daerah lainnya. Pengalaman konflik masa lalu ini kemudian masyarakat tidak ingin menerima pemekaran wilayah baru itu, karena mereka tidak mau menjadi korban lagi, sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Pemekaran wilayah di Papua dilakukan hanya untuk kepentingan segelintir elite lokal dan masyarakat kecil yang selalu menjadi korban kepentingan elite politik lokal yang mencari jabatan. Untuk mengejar jabatan tersebut elite politik lokal bersaing untuk merebut suara rakyat dan dalam proses ini kemudian kerap menimbulkan konflik di tanah Papua.

Informan lain menjelaskan bahwa pemekaran di lihat dari teori sebenarnya ada syarat utama yang harus di terpenuhi mengukur jumlah populasi, mengukur luas teritorial alam dan lain -lain. Saya menilai potensi alam dan luas teritorial telah memenuhi syarat, tetapi khusus populasi saya menjamin benar - benar tidak rasional dan tidak memenuhi syarat, bagaimana jumlah populasi manusia Papua hanya dua juta penduduk bisa bagi- bagi ke dalam provinsi dan kabupaten yang jumlahnya cukup banyak dan dikatakan bahwa jumlah penduduknya telah memenuhi syarat. Pemekaran dilakukan hanya secara formalitas saja dan tujuan bukan untuk pembangunan.

Pemimpin Papua dan masyarakat Papua harus tahu bahwa tujuan utama pemekaran provinsi maupun Kabupaten/kota di tanah Papua demi pemerataan dan percepatan pembangunan adalah hanya alasan pemerintah pusat, sebenarnya adalah rencana dan upaya pemerintah pusat mengurangi kepadatan penduduk di Ibu Kota ke daerah - daerah yang tanahnya masih kosong. Hal ini mengakibatkan setiap tahun di Papua terjadi kebanjiran penduduk dari kota ke Desa (transmigran) dan masyarakat asli merasa sangat terusik atau terisisikan.

Seorang Pastor Katolik Ibarani Gwijangge dari distrik Mimika Baru berpendapat:

Kita melihat bahwa, Tujuan utama otonomi Daerah, berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004 adalah mengingatkan kesejahteraan masyarakat dan mendayagunakan orang asli Papua, melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial politik. Bukan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah atau elit lokal memintah pemekaran wilayah baru(DOB). Bahwa berkaitan dengan pemekaran wilayah provinsi atau pemekaran tingkat kabupaten atau kota atau Distrik yang sedang ramai- ramai di tanah Papua, saya tidak setuju atau tidak menerima dengan hati. Karena

dengan hadirnya pemekaran wilayah baik itu provinsi Papua pengunungan maupun provinsi Papua Tengah dan beberapa pemekaran yang lainnya.

Kami masyarakat Papua merasa tidak ada keuntungannya bagi kami orang asli Papua, justru merugikan masyarakat orang asli Papua dan dampaknya akan nyawa kami bisa terancam. Kami masyarakat Papua menilai bahwa hadirnya pemekaran wilayah itu karena ada unsur kepentingan politik, dalam artian bahwa orang ramai- ramai mengantar aspirasi ke pemerintah pusat karena kepentingan segelintir elit lokal papua itu sendiri atau mengejar jabatan saja, untuk menguntungkan kepentingannya. Berkaitan dengan itu, masyarakat belum tentu menerimanya dengan sepenuh hati. Akan tetapi pasti tidak 100% menerima atau setuju dengan pemekaran tersebut, karena masyarakat lebih memahami dengan terjadinya konflik dalam peristiwa- peristiwa yang telah mereka alami di masa lalu bahkan konflik yang sedang mereka hadapi sekarang. Konflik pemekaran yang terjadi di tanah Papua tersebut menimbulkan banyak persolan di daerah di tingkat kalangan masyarakat bawah.

5.9 Hasil Wawancara

1. Identitas Subjek Narasumber ke satu

Nama : Arianus Katagame, S.Pt.,M.MPT

Alamat : Alama

Umur : 33 Tahun

Status : PNS

Pekerjaan : Sekdis

Agama : Kristen protestan

Jenis kelamin : laki –laki

Tempat wawancara : kab. Mimika

Hasil Wawancara :

Pertanyaan :

Sesuai dengan judul tesis : pemilihan kepala daerah dalam perspektif otonomi khusus studi kasus sengketa konflik horizontal antar suku dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten mimika tahun 2018. Melihat perkembangan dunia politik baik di tingkat Internasional, nasional maupun tingkat politik lokal di Papua, pada konteks dalam pemilihan baik DPD, DPR dan Bupati selalu di pandang bahwa Papua daerah konflik horizontal selalu terjadi di setiap dekade. Kemudian konflik

itu terjadi bukan dengan orang luar namun antar sesama suku baik sesama marga, keluarga, antar kampung, antar distrik bahkan bisa terjadi antar kabupaten.

1. Penyebab terjadinya antar perang suku dalam penentuan bupati dan wakil bupati?

Responden : konteks pilkada ini ada dua factor yang selama ini saya melihat yaitu

Yang pertama, factor partai politik juga selama ini di daerah selaku ketua DPC atau ketua DPW tetapi saat munculnya musim politik itu terkadang -kadang, DPP di pusat itu memberikan rekomendasi kepada pihak kadidat lain. Notabene tentu disitu terjadi manipulasi politik sehingga pada kader yang di Daerah merasa dirugikan sehingga calek membongkari masanya untuk melawan pada kubu yang lain. Yang mendapatkan rekomendasi yang lain. Ini factor- factor partai politik yang terjadi adalah orang - orang elit partai politik di Jakarta memberikan rekomendasi kepada kadidat lain. ketika melihat tidak menghargai pada ketua DPC partai di daerah Dia selaku pengurus partai politik atau ketua DPC di daerah. Ini juga sering memicu masalah sehingga terjadi konflik. Contoh tahun 2013 terjadi konflik di puncak itu hanya gara – gara kesalahan rekomendasi dari DPP memberikan pada kadidat lain, bukan jatuh pada kadidat atau pengurus DPC.

Kemudian yang kedua itu terjadi pada masalah pilkada. satu masalah penyelegarah, penyelegarah ini kan luas di dalamnya ada KPU, Bangwaslu, turun di tingkat distrik atau kecamatan panitia pemugutan sura, kpps sampai di tingkat kampung atau Desa. tingkatan rekrutmen mulai dari bawah naik ini di tingkatan Desa kadidat A atau B itu mendapatkan unggul tetapi keunggulan itu bisa saja terjadi pada saat pleno di tingkat Distrik itu hasilnya bisa berubah. Begitu juga naik sampai di tingkat KPU itu kadang berubah. Berubah itu tentu karena sponsor. Kemudian ada faktor pesanan itu juga dengan pendekatan manipolitik ini, mempengaruhi semua lini baik itu penyelegarah, sehingga ini juga bisa terjadi tingkat Distrik, ke kampung ke tingkat Distrik ke KPU terjadi manipulasi oleh penyelegarah sendiri. Ini juga menyebabkan terjadinya konflik antar pendukung, pendukung A atau Pendukung B itu sering terjadi, karena masyarakat akar rumput tau bahwa unggul di kampungnya, di kecamatannya adalah di kadidat A atau B tetapi ternyata tiba- tiba hasil itu bisa berubah di KPU, ini juga yang menjadi menyebabkan terjadinya konflik, konflik itu tidak bisa hindari, karena yang di percayakan oleh masyarakat itu hasil legalitasnya atau hasil pleno KPU itu tidak di tetapkan yang di harapkan oleh masyarakat tapi, tiba – tiba hasil itu jauh dari apa yang masyarakat harapkan, ini yang menyebabkan konflik itu tidak

bisa hindari. Karena mereka lebih pada hasil yang mereka berikan itu yang mereka mempertahankan itu. Ini yang terjadi di Papua pada khususnya di Papua pengunungan lebih khusus di Timika, jangankan Pilkada, dalam pemilihan kepala desa atau kepala kampung saja sering terjadi konflik internal itu sering ada karena sistem ini masih terdorong di benaknya masyarakat sehingga masih berlaku di kalangan masyarakat.

Melihat sesuai dengan perkembangan politik lokal dalam pemilihan kepala daerah, dalam penentuan tersebut selalu terjadi perang antar suku atau kubu A dan Kubu B untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengapa terjadi hal seperti ini selalu terjadi?

Terkait sangat benar, Dari sisi penyelektoran sudah saya jelaskan namun pada sisi lain para kandidat ini ada yang mengerti politik dan ada juga yang tidak mengerti politik, sehingga yang tidak mengerti dalam dunia politik ini dia mengponsori masanya dengan segala kekuatan dan segala kemampuan dan dayanya seolah – olah kekuatan otot itu yang mengedalikan situasi keamanan sehingga, kelompok lain lebih patuh pada kelompoknya. Sehingga faktor – faktor ini juga mempengaruhi kemampuan untuk menyiapkan visi, Misi untuk pembangunan 5 tahun kedepan sehingga dia kampanye untuk menjajinkan masyarakat untuk soal pembangunan tapi sebaliknya. Dia tidak memiliki kemampuan itu, namun dia punya kemampuan hanya mempropokasi masyarakat dengan tentu menggunakan dengan cara - cara ilegal.ilegal itu mungkin menggunakan uang atau apapun yang digunakan dengan berbagai cara mempegaruhi masyarakat, bahwa seolah - oalah dia lebih pada bentrokan konflik. Jadi intinya dalam Pilkada itu tidak perang suku, yang itu hanya konflik horizontal antar pendukung.

Oleh karena itu, sebenarnya istilah perang suku ini tidak ada, hanya konflik antar pendukung atau konflik horizontal. Karena secara umum konflik itu ada dua yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal, konflik vertikal itu antar Negara dengan mempertahankan ideology negaranya. Namun konflik horizontal ini hanya di antara mereka yang saling paham atau saling gesekan, itu lebih ke masalah - masalah social politick itu biasa terjadi di mana – mana. karena hanya melibatkan mereka dengan meeka.

2.Dampak dari DOB atau daerah otonomi Baru

Yang pastinya peluang itu ada, hanya saja bagaimana para pemimpin bisa meminimalisir agar konflik itu tidak terjadi lagi. Terkait hal seperti ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. Yang pertama partai politik, partai politik dalam hal ini, DPC, DPW sampai dengan DPP, mereka harus melihat calon itu secara baik, bukan melihatnya pada uangnya atau kayanya tetapi, kemampuan kemampuan managerial memimpin untuk daerah masalah – masalah itu bisa diatasi dalam hal , di lihat dari apa yang di inginkan oleh masyarakat.karena masyarakat yang sering konflik ini mereka tidak memiliki pekerjaan, dalam arti di sibukan dengan program – program pemerintah untuk masuk ke kampung, distrik sehingga masyarakat itu disibukan dengan pekerjaan berarti konflik – konflik ini bisa di atasi dengan baik. Karena mereka punya rutinitas atau pekerjaan yang setiap saat itu ada. Supaya mereka tidak berpikir untuk berkonflik sana sini tetapi orang - orang yang memiliki kemampuan akan masyarakat itu akan di pelihara dengan cara - cara yang mudah sehingga masyarakat tersebut menjadi kebiasaan untuk menciptakan konflik itu akan terus terjadi. Ini yang perlu di perhatikan oleh seorang pemimpin
2. Kemudian yang berikut itu, menyangkut penyelegarah KPU sampai dengan tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjunjung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang - kadang berubah. Karena saat penyelegara ini, saat rekrutment timsel itu orang - orang dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a,Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dari pusat. Kemudian mereka yang dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga tim sel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesann itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut.ini yang perlu di rubah sehingga hasil rekapan – rekapan itu bisa model berita acara A,B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki.seharusnya hasil yang di tingkat

TPS tingkat yang paling bawah itu yang buat rubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi mereka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setaip tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan – perubahan itulah yang terjadi pengalihan sura masuk dalam kepentingan para elit mani politik. orang yang tidak ada sura itu tiba –tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung,kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehinga orang - orang yang duduk dilembaga -lembaga KPU mereka juga tahu,bahwa mereka salah mereka di pecat melui proses hukum atau DKPP pecat mereka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang – orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang.tetap mereka puanya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang – orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalu prosedur hukum oleh penyelegarah.

3. Resolusi konflik horizontal dalam pemilihan kepala daerah

Respoden : harapan secara keseluruhan orang papua bahwa di Indoensia ini Negara sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia bahwa sistem demokrasi itu sangat baik, hanya saja oknum atau para penyelegarah harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Kenapa karena sistem sebagus apapun tetapi penyelegarah atau orang – orang yang menyelegarah itu kalau etika dan moralitasnya baik maka sistem sebagus apapun yang di jalankan itu tidak akan baik.maka dalam rekrutment penyelegarah itu harus memiliki integritas sebagai warga Negara yang demokratis. Karena walaupun integritas itu kadang - kadang mereka buat tetapi sumpah janji yang mereka buat itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga cara- cara seperti ini,sistem rekrutment ini benar – benar orang memiliki wibawah harkat dan martabat bisa membawah perubahan – perubahan demi kemajuan bangsa dan Negara.jika tidak memiliki integritas dan etika, maka sama saga pratek korupsi,kolusi dan nepotisme ini tentu di lakukan oleh penyelegarah - penyelegarah, termasuk penyuapan dan serangan fajar dan istila istilah penerapan pada prakter - pratek ini masih banyak yang terjadi.sehingga orang menjadi pemimpin di daerah diamana - dimana saya melihat

bahwa itu orang yang sama dan orang yang memiliki modal. Orang memiliki modal tetapi tidak memiliki wibawa, tidak punya pengetahuan dan tidak memiliki kemampuan management yang baik sehingga orang - orang ini yang masuk menjadi pemimpin, maka Negara ini hancur dan tidak memiliki tujuan yang pasti dan di kendalikan oleh orang - orang yang tidak memiliki integritas dan orang - orang tidak memiliki wibawa dan orang - orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tidak jelas dan management kepemimpinan yang tidak tepat pada tujuannya. manajemen kepemimpinan tidak jelas dan hanya itu menjadi sebatas lahan bisnis sehingga semua kekuatan dan kekuasaan semua yang ada, kewenangan menyalagunakan wewenang tersebut sehingga banyak kekeliruan termasuk keamanan juga pada pemimpin daerah. ketika pemimpin daerah mampu mengedalikan maka pemimpin daerah tersebut bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di daerah. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan cara - cara program - program tersebut bisa langsung menyentuh kepada masyarakat. tetapi kadang - kadang masyarakat yang akar rumput itu di jadikan tameng untuk menciptakan konflik dengan alasan konflik itu, semua kegiatan pembangunan tertentu dengan alasan keamanan ini juga sering terjadi. Sehingga dengan harapan terutama partai politik perlu selektif melihat figure - figur itu dengan baik. termasuk rekrutment tadi penyelelahar pemilu maupun bawaslu harus orang yang memiliki integritas wibawa dan bisa bertanggung jawab. Hal - hal seperti itu jalan tentu Negara ini bisa di selegarahkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik karena kita di dalam Negara kesatuan republik ini, kita sering kenal dengan KKN, atau korupsi, kolusi dan nepotisme itu sudah menjadi darah daging dan sudah berkembang ke segala penyuruh atau segala aspek lembaga baik itu pemerintahan, swasta maupun lembaga - lembaga penyelelahar lain. ini yang perlu di kurangi dengan cara orang yang memiliki komitmen sehingga bisa pulihkan hal tersebut. sistem - sistem seperti ini tidak menutup kemungkinan konflik - konflik horizontal atau perang antar suku ini akan terus terjadi di daerah - daerah pemekaran yang di rilis atau di mekarkan oleh pemerintah pusat. Dan ini akan menjadi menambah persoalan di pemekaran baru yang sedang di mekarkan. karena melihat dari pengalaman dalam dua provinsi ini saga selalu terjadi berbagai persoalan di atas tanah papua. Pemekaran baru maupun pemerintahan sekarang, apa bila itu pimpin oleh orang yang sama kemudian sistem yang sama dalam mengelolah roda pemerintahan, maka hal ini akan terus akan terjadi. Karena orang - orang yang menyelelaharkan itu sistem yang sama dan orang yang sama. karena pemimpipinnya tidak memiliki moral, etika dan integritas sehingga hal tersebut selalu terjadi dan tidak menutup

kemungkinan persoalan konflik horizontal ini selalu terjadi trus di daerah.oleh karena itu setipa pemimpin harus menjunjung tinggi pad undang - undang . Pancasila sebagai ideologi negara kemudian UUD 1945 sebagai landasan dasar Negara.

3. harus takut dan tunduk pada Tuhan, karena Negara manapun agama mengajarkan hal yang baik dan hal yang positif karena agama selalu mengajarkan hal yang positif. Ketika kita sudah mengakui bahwa warga Negara yang baik, maka tujuan dari pada Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat rakyat miskin. Supaya menerapkan sistem - sistem yang baik agar tidak merugikan yang lain.

2. Identitas Subjek Narasumber ke Kedua

Nama : Dr. Krinus Kum. S.IP.,M.Si.,M.AP

Alamat : Tsingga,

Umur : 42 Tahun

Status : swasta

Pekerjaan : Dekan Fakultas

Agama : Kristen Protestan

Jenis kelamin : Laki- laki

Konsep perang suku

Perang suku adalah suatu perang yang berlangsung antara dua kubu pihak baik secara bersekutu atau tidak dengan dasar keberpihakan adalah alasan kesukuan. Berbeda dengan perang konvensional, alasan perang suku biasanya adalah perebutan sumber makanan atau perebutan tanah hak ulayat. Dan keputusan perang atau damai serta pemimpinjalannya peperangan biasanya di pimpin oleh kepala suku. Walau mengakibatkan korban jiwa atau luka -luka tetapi sebuah perang suku lebih mirip sebuah tauran. Perang saman modern sebuah perang suku akan segera di tengai dan dilerai oleh pihak keamanan, karena sebuah suku bisanya di bawah naungan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Pada zaman daulu pihak yang kalah dari sebuah perang suku biasanya akan memusnahkan, di perbudak atau di usur oleh pihak yang menang, tetapi pada zaman modern hasil dari sebuah perang suku tidak tidak mengubah peta tritorial atau keuntungan finansial

apapun. perang suku hanya berlangsung di suku suku tradisional di papua, di afrika dan di suku Indian di hutan Amazon, sedangkan perkelahian antar suku berdasarkan fanatisme suku di daerah perkotaan sering di kategorikan tauran atau perkelahian. Konflik pada setiap level sangat signifikan dengan dinamika kebersamaan. Ini mendorong mereka yang terlibat untuk menguji para pihak melakukan perbandingan. Orang yang terlibat dalam konflik horizontal antar etnik mendorong melakukan konflik, karena mereka mempunyai satu kesatuan merebutkan. Satunya nilai atau nilai bersama yang tidak dapat di pertemukan itulah yang di jadikan tantangan bersama. konflik etnik (intraetnik maupun entraetnik) umumnya berlaku antara etnik mayoritas dan etnik minoritas, meskipun sana- sini diwarnai oleh faktor - faktor social maupun kultural, seperti Agama, pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, status social ekonomi, dominasi budaya dan lain - lain. konflik etnik sering di iringi oleh kekerasan yang berlangsung dalam satuan ruang (geografis fan kultur) serta priode tertentu. Umum mereka yang terlibat konflik horizontal merasakan bahkan yakni bahwa mereka kurang puas karena mereka kebutuhan dasar mereka tidak di penuhi. Tambah lagi minoritas cenderung yakin mereka tidak di perhatikan, harapan mereka sering di sepelekan dan kebudayaan mereka tidak pernah di perhitungkan. mayoritas sering merasa bahwa kehadiran kelompok minoritas mengancam, apalagi ada pemimpin minoritas yang bekerja sama dengan kelompok musuh. ini membuat mayoritas kerap merasa bahwa kehadiran minoritas merupakan ancaman terhadap keamanan.

Kemudian lebih focus pada dalam konteks persoalan pemilihan kepala daerah, terkadang selalu terjadi konflik horizontal perang antar suku di perlibatkan berabagai suku sehingga menciptakan konflik terpanjang yang tidak hentinya.

Ada tiga faktor yang selalu menganjal, pertama selalu membangun pendekatan sukuisme, kampungisme, dan distrik isme dalam pemilihan kepala daerah. kemudian yang kedua adalah tidak ada kesepakatan dari pihak pecaleg. Yang ketiga adalah dari tim seleksi baik tingkat paling bawah yaitu tingkat kampung atau Desa sampai tingkat pusat, tim kerja tidak selektif dan ketidak konsistensi baik pihak penyelelahar maupun timsel yang di persiapkan. Dalam hal ini tingkat TPS, PPS, KPPS, KPU dan Bawslu. Ketidak konsistensinya kerja yang tidak berprofesional sehingga terkadang mereka yang penyelelahar inipun menjadi actor menciptakan konflik, karena lebih pendekatan keluargaisme dan sukuisme. Kemudian yang berikut itu, menyangkut penyelelahar KPU sampai dengan tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di

biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjunjung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang - kadang berubah. Karena saat penyelegara ini, saat rekrutment timsel itu orang - orang dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a, Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dari pusat. Kemudian mereka yang dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga tim sel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesann itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut. ini yang perlu di rubah seingga hasil rekapan - rekapan itu bisa model berita acara A, B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki. seharusnya hasil yang di tingkat TPS tingkat yang paling bawah itu yang buat rubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi meraka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setaip tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan - perubahan itulah yang terjadi pengalihan sura masuk dalam kepentingan para elit mani politik. orang yang tidak ada sura itu tiba- tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung, kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehinga orang - orang yang duduk dilembaga - lembaga KPU mereka juga tahu, bahwa mereka salah mereka di pecat melui proses hukum atau DKPP pecat meraka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang - orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang. tetap mereka puanya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang - orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalu prosedur hukum oleh penyelegarah.

Berkaitan dengan setaip konflik yang terjadi kabupaten mimika, mayoritas warga kampung ini terdiri dari suku Dani, Damal, Amungme, Mee, Nduga,, diikuti oleh lain, seperti dari Sulawesi dan biak. Sebagian warga suku -suku lain wilayah itu, tercatat sangat produktif mencaiptakan konflik. Setiap tahun daerah ini tidak luput dari konflik berdarah yang menobatkan kota timika

sebagai kota paling rawan di Papua. Bagi warga yang suka konflik, nyawa manusia sama harganya dengan hewan. Nyawa seorang bisa digantikan beberapa ekor babi atau diukir beberapa lebar rupiah. Bauh darah manusia sama harganya dengan bauh darah binatang. Entah beberapa banyak liter telah tertumpah di atas salah satu bagian tanah Amungme ini.

Jika di telusuri lebih jauh, hampir seluruh elemen masyarakat pernah terlibat dalam konflik - konflik di Timika, secara vertikal maupun horizontal. Pada arah horizontal terjadi konflik antar suku pribumi, konflik antara suku pendatang. Sering terlalu sering pula terjadi konflik vertikal, misalnya antara suku di pribumi dan aparat keamanan. Konflik yang melibatkan suku-suku pribumi, (Nainatnengel) dengan suku-suku pendatang (Moangan Me), atau dengan aparat keamanan pada umumnya, bersinggungan dengan perbedaan cara pandang terhadap suatu kasus / objek. Pemucunya terkadang bersifat pribadi-pribadi namun, pada proses meluas melibatkan mayoritas masyarakat. Khususnya konflik antar suku pribumi dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pemuci konflik berpusat pada pemilu dalam mempertahankan dari kubu A dan Kubu B, dalam pendekatan menentukan pecaled dari tingkat dapil masing-masing. Eliti-elit lokal yang berda di kabupaten Mimika tentu memanfaatkan konflik perang antar suku di kabupaten Mimika. Elit lokal yang dimaksud adalah kepala daerah atau bupati setempat termasuk para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama menjelang pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk individu-individu yang menfatkan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kemudian terjadi persaingan yang sangat ketat antara calon kepala daerah yang satu dengan calon kepala daerah yang lain untuk merebut suara rakyat, dengan pendekatan pengang orang-orang yang memiliki kapasitas di kalangan tersebut. Perang suatu moment yang tepat bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketika mereka meredakan atau mengatasi konflik yang terjadi di antara sesama suku, dalam saling mempertahankan kubu Si A dan kubu Si B.

3. Identitas Subjek Narasumber ke Ketiga

Nama : Bung N. Gobay
Alamat : sp2 timika
Umur : 33 Tahun
Status : PNS
Pekerjaan : camat

Agama : Kristen protestan

Jenis kelamin : laki –laki

proses terjadinya konflik horizontal dalam pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati lebih khusus di timika ?

Dalam proses pra pemilu maupun pilkada sering terjadi manipulasi pemilu oleh penyelenggara terjadi manipulasi baik tingkat Bawaslu, KPU, KPS , TPS maupun tingkat level paling bawah yaitu kampung atau desa. Dalam pemilu ada dua faktor yang selalu terjadi dalam proses penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Yang pertama adalah di kabupaten mimika sistem noken sudah tidak berlaku,hapus namun praktek politik big man atau sistem musyawara masih berlaku sehingga orang - orang atau para intelektual di pengaruhi oleh elit - elit kepentiang untuk menguasai kedudukan atau posisi yang mereka inginkan. Sehingga di tingkat TPS atau tingkat desa masih berlaku sistem praktek pola big man kepala suku atau para intelektual mempersatukan mereka musyawara mewakili anggota masyarakat untuk memberikan suara memilih kandidat yang diinginkan bukan masyarakat harapkan.

Kedua adalah masih berlaku pemberian suara mewakili masyarakat hanya orang - orang tertentu melalui musawara tanpa harus melibatkan anggota secara keseluruhan di kampung tersebut. Kemudian setelah memberikan suara dan harapan besar masyarakat dalam proses penentuan kepala daerah, tidak sesuai apa yang masyarakat harpan. Tingkat tps,kpps dan ppd mereka manipulasi data. Dari lapangan kandidat pemenang si A secara resmi namun di tingkat distrik atau KPU kabupaten suara tibah - tibah berubah. Akhirnya terjadi memicu konflik horizontal perang antar suku selalu terjadi di kalangan masyarakat dan dampak dari itu yang korban nyawa masyarakat yang tidak bersalah menjadikan korban akibat kepentingan 1,2 orang. Karena masyarakat merasa mereka di korbakan. Harapan mereka tidak berjalan dengan baik, karena selalu terjadi kecurangan dalam pembacaan hasil pleno atau pembacaan hasil perolehan suara yang di berikan kepada kandidat yang mereka berikan itu tidak sesuai sehingga akibatnya orang intelektual mengempor masa untuk memprotes hasil perhitungan suara, karena tidak sesuai maka terjadi perang antar suku di kabupaten atau kota.

4. Identitas Subjek Narasumber ke Empat

Nama : Teri Gwijangge

Jk : laki -laki
Agama : Kristen Protestan
Umur : 29 Tahun
Jabatan : SWASTA

pada tanggal 15 Juli 2023, penulis melakukan wawancara terkait pemilihan kepala daerah dan Ia menjelaskan tentang sistem pelaksanaan pemilihan umum pasangan umum calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dan calon wali kota dan wakil wali kota selalu memilih serentak di seluruh di Kabupaten Timika. pencobolosa atau pencorengan secara serentak berlangsung di 388 tempat pemungutan suara (TPS), ketika itu Ia pun mengikuti coblos di TPS. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah tersebut, terjadi temuan-temuan pelanggaran dan kecurangan- kecurangan di dalam proses pemilihan umum berlangsung. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, pelanggaran kecil maupun pelanggaran besar atau pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi yang terjadi di seluruh polsosok pemilihan kepala Daerah di kabupaten Mimika. Pesta Demokrasi berlangsung atau pencoblosan di setiap TPS sudah terjadi beberapa kecurangan, baik itu terjadi secara sembunyi atau secara terang - terangan. Banyak yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan berlangsung, kemudian pihak yang melakukan pelanggaran di setiap proses pemilihan kepala Daerah, menemukan suatu kecurangan dan banyak menyaksikan dari pra saksi dari masing - masing kandidat, masyarakat umum dan pihak - pihak yang lain termasuk juga penulis, bahwa yang melakukan pelanggaran baik, secara pidana atau secara administrasi di antaranya merupakan ketua komisi pemilihan umum Daerah (KPUD), pengawas panitia pemilu (panswaslu), panitia pemilihan Distrik (PPD), panitia pemilihan suara (PPS), kandidat tertentu, pihak lainnya. Sehingga ada beberapa hal yang di atas ini selalu terjadi manipulasi politik dalam melakukan pemilihan kepala Daerah untuk kepentingan jabatan.

5. Identitas Subjek Narasumber ke Lima

Nama : Elius Gwijangge,
Jk : laki -laki
Agama : katolik
Umur : 33 Tahun
Status : kepala Kabit Ketenagakerjaan

Distrik : Wania timika papua

Pada tanggal 16 Juli 2023, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh CPNS di Kabupaten Mimika ia menjeleaskan faktor yang memengaruhi terjadinya konflik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, bahwa berkaitan dengan konflik di kabupaten mimika ini, terutama orang yang memiliki modal baru bisa menang d dalam pemilihan calon kepala Daerah dan wakil kepala Daeah baik Anggota Legislatif maupun Eksekutif, meskipun Ia kalah. Kemudian orang yang tidak memiliki modal siap menerima kealahannya, meskipun Dia menang dari suara rakyat.karena melalui pengamatan kami selama beberapa kali melaksanakan pemilihan kepala Daerah dan Anggota Legislatif di Daerah ini, KPUD sudah bermain. Artinya, suara rakyat murni yang peroleh sala satu calon legislative tertentu KPUD di alihkan suara sebgain ke sala satu calon legislative yang memiliki uang atau sudah di bayar.

sebagai contoh pemilihan serentak Anggota legislative di kabupaten mimika beberapa tahun terakhir di kabupaten miimika atas nama Inisial F.U. mendapatkan suara rakyat dari Daerahh pemilihan Dapil I, Memperoleh 3.16 suara, tetapi waktu pleno di tingkat KPUD menetapkan 2.716 suara, berarti hilang 500 suara. Dalam hal ini di duga bahwa KPUD melakukan kecurangan dengan cara memindahkan suara tersebut ke calon anggota legislative yang lain. Oleh karena itu, hal - hal yang tidak professional seperti inilah yang selalu membuat mereka menimbulkan konflik di daerah papua pada khususnya di Mimika.

Salah satu contoh peristiwa konflik antar bakal calon Bupati Kubu Elvis Tabuni dengan Kubu simon Alom di kabupaten puncak, itu sesungguhnya merupakan suatu konflik kepentingan yang sengaja di bangun atau di ciptakan oleh orang - orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan untuk sepihak dalam melakukan pemilukada tersebut. tentu saga kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau actor konflik.tetapi kedua tokoh inilah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di motori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik iitu. Melihat berdasarkan realitas di atas paling tidak terdpat beberapa sumber potensial yang dapat yang dapat memicu konflik ada di dalam pilkada.

Pertama adalah konflik yang bersumber dari satu partai politik pendukung atau dua tiga pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, karena pemimpin politik lokal tidak saling mendukung. Kedua, konflik bersumber dari KPUD tidak mengambil keputusan yang matang atau tidak professional.ketiga, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan ataupun

kedaerahan. Keempat, konflik bersumber dari black camping antara pasangan calon, dan terakhir konflik bersumber dari ketidaksetujuan salah satu calon terhadap panitia pemilihan umum daerah (KPUD), yang dipilih oleh KPUD.